

STRATEGI PETANI HUTAN RAKYAT DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGHIDUPAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Silvi Nur Oktalina

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
Email: silvi.nuroktalina@ugm.ac.id

San Afri Awang dan Priyono Suryanto

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Slamet Hartono

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The land ownership of smallholder private forest farmers is relatively narrow, so some researchers argue that the forest product is not appropriate to fulfill daily needs. To increase and spread the private forest management risk, farmers diversify crops into several species. In order to identify the farmer strategy through optimizing the land, we developed household survey for 90 respondents from 3 villages in Batur Agung zone, Ledok Wonosari zone and Pegunungan Seribu zone. The survey results showed that private forest utilization by agroforestry is a type of local wisdom, as farmers' strategy to fulfill the farmers' need. Private forest contribution toward total income in Gunungkidul is 13-40%. The biggest contribution for farmer in Batur Agung zone and Ledok Wonosari is from trees (59-61%), while for farmer in Pegunungan Seribu is from crops (59%).

Keywords: *Agroforestry; Local wisdom; Gunungkidul; Private forest; Survey; Strategy.*

ABSTRAK

Petani hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul mempunyai lahan yang relatif sempit sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Petani hutan rakyat melakukan strategi diversifikasi jenis tanaman penyusun hutan rakyat. Petani hutan rakyat melakukan strategi diversifikasi jenis tanaman penyusun hutan rakyat untuk meningkatkan hasil dan menyebar resiko pengelolaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi petani hutan rakyat dalam memanfaatkan lahan dan kontribusinya terhadap penghidupan. Survei dilakukan terhadap 90 responden di tiga desa dari 3 zona (Batur Agung, Ledok Wonosari dan Pegunungan Seribu). Hasil survei menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan hutan rakyat dengan teknik agroforestri merupakan strategi diversifikasi yang dilakukan petani dalam pengoptimalan penggunaan lahan hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pilihan strategi diversifikasi pemanfaatan lahan hutan rakyat merupakan kearifan lokal masyarakat. Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani di Kabupaten Gunungkidul adalah 13-40%. Bagi petani hutan rakyat di zona Baturagung dan Ledokwonosari kontribusi terbesar berasal

dari tanaman kehutanan (59-61%), sedangkan di zona Pegunungan seribu berasal dari tanaman pertanian dengan kontribusi sebesar 59%.

Kata Kunci: *Agroforestri; Gunungkidul; Hutan rakyat; Kearifan lokal; survei, strategi.*

PENGANTAR

Hutan rakyat merupakan aset penghidupan bagi petani di Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari program pemerintah Belanda pada tahun 1930an dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1952 melalui gerakan "Karang Kitri". Secara nasional pengembangan hutan rakyat selanjutnya berada dibawah payung program penghijauan yang diselenggarakan pada tahun 1960-an melalui pekan penghijauan (Awang dkk., 2002; Simon, 2004; Utari, 2012). Perkembangan hutan rakyat juga didorong oleh motivasi petani untuk terlepas dari permasalahan lingkungan. Daerah Gunungkidul adalah daerah yang berlahan kritis, tanahnya tandus dengan solum tipis berkapur, berbatu dan beriklim tropis kering serta dikenal sebagai daerah yang sulit air (Awang dkk., 2002). Kondisi inilah yang memotivasi petani untuk menanam pohon dan mengatasi masalah kekritisn lahan.

Awang dkk. (2002) mengelompokkan perkembangan hutan rakyat di Gunungkidul menjadi empat periode: *Pertama*, periode pertama, sebelum tahun 1960, pada periode ini lahan milik dan hutan negara berupa hamparan batu bertanah kritis dan hanya ditumbuhi rumput ataupun semak, jarang dijumpai tanaman kayu; *Kedua*, periode kedua tahun 1960-1970, yaitu periode penanaman kayu pada lahan kritis secara swadaya oleh petani. Bibit tanaman diperoleh dari anakan tanaman kayu alam yang diambil dan ditanam di lahan miliknya; *Ketiga*, periode ketiga merupakan periode intensifikasi antara tahun 1970-1985, yaitu periode penanaman secara intensif. Pada periode ini mulai ada campur tangan pemerintah dalam bentuk bantuan bibit, tenaga penyuluh, dan sarana-sarana yang lainnya; *Keempat*, periode keempat, merupakan periode permudaan

alam yang berlangsung sejak tahun 1985. Pada periode ini masyarakat melakukan permudaaan dengan anakan alam. Periode selanjutnya menurut Utari (2012) adalah perkembangan hutan rakyat yang didorong oleh adanya program-program pemerintah, misalnya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN), kebun bibit rakyat (KBR) dan pemberian bantuan bibit pada tahun 2000an.

Berdasarkan hal tersebut maka secara umum perkembangan hutan rakyat di Gunungkidul telah melewati empat fase perubahan, yaitu (1) pembangunan hutan rakyat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya kekritisn dan konservasi lahan; (2) pemanfaatan hasil hutan rakyat kayu untuk pemenuhan kebutuhan sendiri; (3) hasil hutan rakyat kayu mulai menjadi komoditas ekonomi; (4) Pengelolaan hutan rakyat secara lestari berdasarkan beberapa skema sertifikasi. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Adhikari (2004) yang menyatakan bahwa perkembangan hutan rakyat di negara berkembang mempunyai tujuan ganda, yaitu pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus untuk kepentingan konservasi keanekaragaman sumberdaya alam.

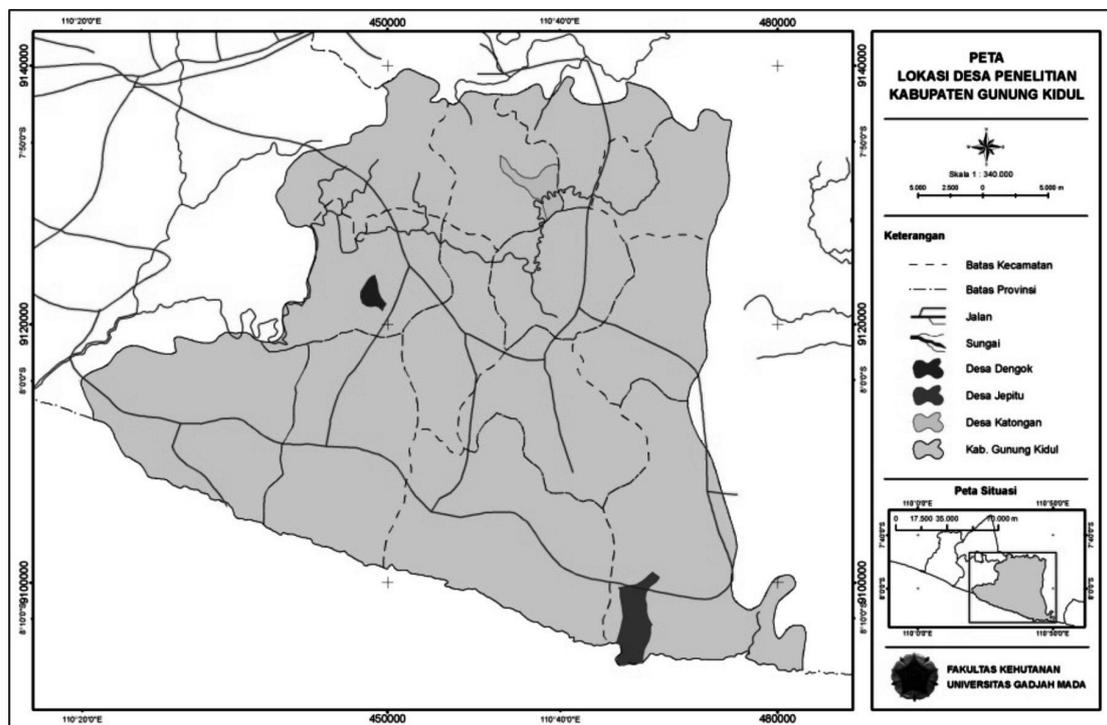
Perubahan orientasi perkembangan hutan rakyat mempengaruhi pola pemanfaatan lahan oleh petani. Sabastian (2012) mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan hutan rakyat di bedakan menjadi tiga, yaitu pekarangan (lahan hutan rakyat yang berada disekitar rumah), tegalan (lahan hutan rakyat yang terpisah dengan rumah yang ditanami tanaman pertanian dan kehutanan) dan *alas/wono* (lahan hutan rakyat yang jaraknya cukup jauh dari rumah dan ditanami dengan tanaman kehutanan baik secara monokultur maupun polikultur). Pergeseran orientasi pengelolaan hutan rakyat telah mengakibatkan petani mulai menanam lahan hutan dengan tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan dan meninggalkan pola penanaman kombinasi antara tanaman pertanian dan kehutanan. Perubahan pola penanaman hutan rakyat ke tanaman kehutanan juga adanya migrasi penduduk

desa ke kota sebagai akibat terbukanya akses sampai ke pelosok desa di Gunungkidul.

Petani pengelola hutan rakyat di Gunungkidul mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, usia, kemampuan finansial, kepemilikan aset produksi maupun motivasi dari petani tersebut. Perbedaan karakteristik akan berpengaruh terhadap pola pengelolaan hutan rakyat. Karakter yang dimiliki petani tersebut juga berpengaruh terhadap pilihan strategi penghidupan petani. Strategi penghidupan yang sering dikemukakan ada tiga, yaitu intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian maupun non pertanian serta migrasi (Scoones, 1999). Pilihan strategi penghidupan petani yang memasukan hutan rakyat sebagai salah satu assetnya merupakan bentuk kearifan lokal petani. Hutan rakyat di Indonesia berkembang sebagai salah satu bentuk strategi penghidupan petani untuk kepentingan ekonomi dan konservasi (Palte, 1989; Awang, 2006). Strategi penghidupan petani di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada

produksi ternak, tanaman semusim, produk hasil hutan dan bisnis. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut produk hasil hutan merupakan sumber yang penting bagi petani miskin karena memberikan alternatif sumber pendapatan (Tefsaye et al., 2011). Artikel ini selanjutnya akan membahas tentang strategi petani hutan rakyat dalam mengelola lahannya sebagai aset dan kontribusinya terhadap penghidupan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik sampling bertingkat yang membagi wilayah Kabupaten Gunungkidul menjadi tiga zona, yaitu zona Pengunungan Batur Agung (bagian utara), Ledok Wonosari (bagian tengah) dan Pegunungan Seribu (bagian selatan). Dari ketiga zona tersebut selanjutnya dipilih 3 desa secara acak. Desa yang dipilih sebagai desa sampel adalah: (1) Desa Katongan Kecamatan Nglipar di zona pegunungan Batur Agung; (2) Desa Dengok Kecamatan Playen di zona Ledok Wonosari; (3) Desa Jepitu Kecamatan Girisubo di zona Pegunungan Seribu. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Survei dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 30 orang disetiap desa sehingga total responden sebanyak 90 orang. Pengambilan responden dilakukan secara acak sehingga semua petani hutan rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai responden. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi bias dalam pengambilan sampel. Survei dilakukan dengan mewawancari responden secara pribadi baik dirumah maupun di lahan responden. Untuk kepentingan klarifikasi dan melengkapi data survei juga dilakukan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci yang mengerti dan paham terhadap pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Selain ketiga metode tersebut, dilakukan observasi terhadap kondisi fisik lahan hutan rakyat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan lahan hutan rakyat oleh petani. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif terhadap bentuk pemanfaatan lahan hutan rakyat, strategi pengelolaan yang dilakukan petani hutan rakyat, sumber-sumber pendapatan petani dan besarnya kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan.

PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul

Pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul telah mengalami berbagai perkembangan dan dinamika. Fase pertama perkembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul didorong oleh adanya program "Karang Kitri" pada tahun 1952, program penghijauan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)-Netherlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB)* pada tahun 1962 serta inpres penghijauan dan reboisasi yang dimulai pada tahun 1969 (Utari, 2012). Keberhasilan program penghijauan dan reboisasi ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mengatasi kekritisian lahan yang mereka miliki. Program penghijauan memberikan pengaruh bagi penduduk di Gunungkidul untuk melakukan kegiatan

penanaman pohon di lahannya. Akibatnya jumlah pohon pada lahan milik meningkat cukup tinggi (Nibbering, 1999). Fase awal perkembangan hutan rakyat bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dalam hal ini untuk mengatasi kekritisian lahan. Sesuai dengan tujuan tersebut maka jenis-jenis tanaman yang dikembangkan adalah jenis-jenis pioneer yang mampu beradaptasi pada tanah miskin hara dan cepat tumbuh di antaranya *Accacia auriculiformis*, mahoni, sonokeling, dan sengon (Utari, 2012). Hal tersebut sesuai dengan arahan pembangunan hutan rakyat yang merupakan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (BPKH, 2009).

Fase kedua perkembangan hutan rakyat terjadi ketika hasil penanaman pada fase sebelumnya mulai dapat dipanen, yaitu sekitar tahun 1990an. Pada fase ini petani mulai memanfaatkan hasil hutan rakyat yang berupa kayu untuk kepentingannya sendiri, misalnya untuk merenovasi rumah maupun untuk furniture. Pada waktu yang bersamaan produksi hutan alam semakin menurun. Hal ini disebabkan karena deforestasi hutan di Indonesia yang cukup tinggi. Pada periode tahun 1990-2000 angka deforestasi mencapai 1,9 juta ha/tahun atau 1,75% sedangkan pada periode tahun 2000-2010 angka deforestasi di Indonesia adalah 498 ribu ha/tahun atau 0,51% (FAO, 2010). Industri berbahan baku kayu mulai kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu. Hutan tanaman yang dikembangkan pemerintah maupun swasta belum mampu memenuhi kebutuhan industri berbahan baku kayu. Sementara itu potensi hutan rakyat dari fase pertama mulai siap dipanen, sehingga industri beralih menggunakan produk kayu hasil hutan rakyat sebagai bahan baku alternatif. Permintaan kayu hasil hutan rakyat yang meningkat mengakibatkan harga kayu dari hutan rakyat juga mulai naik. Hal tersebut memotivasi petani untuk menanam pohon di lahan hutan rakyat (Fillius, 1997; Awang, 1999). Petani mulai merubah pola agroforestri tradisional menjadi pola *agroforesti intermediate* dan tingkat lanjut (Suryanto

dkk., 2014). Perubahan ini dapat dilihat dari pengelolaan lahan yang semula petani menanam pohon dan tanaman semusim dengan intensitas pengelolaan dan input dari luar yang rendah beralih pada pengelolaan hutan yang lebih produktif, misalnya dengan penanaman pohon multilayer, multiguna, dan pemilihan jenis pohon yang berkualitas serta mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Perubahan orientasi penanaman pohon di lahan hutan rakyat mulai terjadi pada fase ketiga perkembangan hutan rakyat (tahun 2000an), yaitu petani menanam pohon untuk kepentingan bisnis. Selain karena permintaan hasil hutan kayu yang terus meningkat dan diikuti oleh peningkatan nilai hasil hutan rakyat yang berupa kayu, fase ini juga didorong oleh tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota baik secara permanen maupun temporal, sehingga tenaga kerja keluarga di desa menjadi jauh berkurang. Pilihan rasional yang dapat diambil adalah dengan menanam pohon di lahan karena tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif dan lahan tersebut akan tetap menghasilkan. Kelebihan yang didapat dari penanaman pohon menurut Chamber adalah (1) biaya investasi awal dan pemeliharaannya relatif murah; (2) tingkat perkembangan nilai pohon yang lebih cepat di dibandingkan dengan aset yang lain; (3) pemeliharaan lebih mudah dan produk tidak mudah rusak. Perubahan pola silvikultur pun mulai terjadi, yaitu pemanfaatan lahan hutan rakyat yang sebelumnya menggunakan pola agroforestri tradisional dengan kombinasi tanaman pertanian dan kehutanan menjadi penanaman pohon secara monokultur maupun polikultur. Hal ini akan mengancam kelestarian dan fungsi ekologi hutan rakyat (Suryanto dkk, 2014).

Fase keempat perkembangan hutan rakyat yang saat ini terjadi di Kabupaten Gunungkidul adalah dalam aspek pengelolaan. Pengelolaan hutan rakyat mulai dilaksanakan berdasarkan pada konsep sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Terdapat dua skema sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari di Gunungkidul, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat

lestari dengan skema dari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI) dan *Well Managed Group Forest Certification* dari *Forest Stewardship Council* (WMGFC-FSC). Total luas hutan rakyat yang telah disertifikasi dengan skema PHBML-LEI adalah 815,18 ha dan WMGFC-FSC adalah 94,4 ha. Selain kedua skema tersebut juga terdapat skema mandatory dari pemerintah, yaitu sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) seluas 800 ha, sehingga total luas hutan rakyat yang telah bersertifikat adalah 1.707,58 ha atau 5,4% dari total luas hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Implementasi pengelolaan hutan rakyat bersertifikat ini mempunyai banyak kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelebihan yang didapat oleh petani adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani dalam mengelola hutan rakyat. Selain itu potensi hutan rakyat dapat diketahui sehingga monitoring terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan. Dari aspek kelembagaan, skema sertifikasi mensyaratkan adanya lembaga pengelola hutan rakyat, hal ini dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam berhubungan dengan stakeholder, misalnya penentuan harga jual kayu yang selama ini masih ditentukan pedagang sehingga petani masih sebagai *price taker*. Selain kelebihan-kelebihan tersebut kelemahan dari sertifikasi, yaitu biaya proses sertifikasi yang tinggi sehingga tidak dapat dibayarkan oleh petani maupun kelompok tani. Selain itu proses monitoring dan evaluasi sertifikasi tidak berjalan dengan baik sehingga pada saat penilikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. *Premium price* yang di harapkan akan diperoleh dari proses sertifikasi ini juga belum diterima secara langsung oleh petani. Kelemahan-kelemahan tersebut yang membuat petani saat ini meragukan skema dan proses sertifikasi.

Karakteristik Petani Hutan Rakyat

Petani pengelola hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul mempunyai karakter yang beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari umur, tanggungan keluarga,

tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga di lokasi penelitian sebanyak empat sampai lima orang dengan range jumlah tanggungan keluarga antara dua sampai tujuh orang. Jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur modal sumber daya manusia. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga dapat digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan hutan rakyat sehingga tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar keluarga. Namun di sisi lain jumlah tanggungan keluarga juga merupakan beban yang harus ditanggung oleh kepala keluarga.

Selain jumlah tanggungan keluarga, umur merupakan modal sumber daya manusia yang menentukan produktivitas. Petani hutan rakyat di Desa Katongan rata-rata berumur 52 tahun, di Desa Dengok berumur 55 tahun dan di Desa Jepitu berumur 44 tahun. Umur tersebut sebenarnya sangat ideal karena masih belum terlalu tua sehingga tenaga yang dimilikinya masih memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat dalam pengelolaan hutan rakyat. Menurut

Undang-undang No 13 tahun 2003 penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja dengan batas umur 15-64 tahun. Pada golongan usia ini maka dapat dikatakan usia produktif. Berdasarkan hal tersebut petani hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul rata-rata pada usia produktif. Kondisi ini sangat potensial untuk pengembangan hutan rakyat.

Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata petani hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan berimplikasi pada pemahaman terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Dari aspek ini maka penguatan sumber daya manusia pengelola hutan rakyat perlu lebih ditingkatkan, misalnya dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknis budidaya tegakan pada lahan hutan rakyat. Berdasarkan kepemilikan aset yang berupa lahan, setiap petani juga memiliki luasan yang berbeda-beda. Luas lahan hutan rakyat yang berupa tegalan, pekarangan, dan wono disajikan pada Tabel 1. Selain memiliki lahan berupa hutan rakyat, petani juga memiliki lahan yang berupa sawah dan lahan garapan, yaitu lahan hutan negara yang dikelola oleh petani.

Tabel 1
Luas Lahan Garapan Petani

No	Lahan Garapan	Katongan		Dengok		Jepitu	
		Luas (ha/kk)	%	Luas (ha/kk)	%	Luas (ha/kk)	%
A. Lahan Milik							
1	Hutan rakyat	0,48	80	0,43	43,1	1,53	100
2	Sawah	0,06	10	0,07	7,30	0	0
Jumlah A		0,54	90	0,5	50,4	1,53	100
B. Lahan Bukan Milik							
1	Hutan negara	0,06	10	0,49	49,6	0	0
Jumlah B		0,06	10	0,49	49,6	0	0
Total		0,6	100	0,99	100	1,53	100

Sumber. Data Primer, 2013

Tabel 1 menerangkan luas lahan garapan (lahan milik dan lahan bukan milik) petani di lokasi penelitian. Berdasarkan Tabel 1, rata-rata luas kepemilikan lahan hutan rakyat di zona Pegunungan Seribu lebih luas di bandingkan dengan kedua zona lainnya.

Namun kondisi lahan di pegunungan seribu berbukit-bukit dan bergunung-gunung serta berbatu sehingga relatif lebih sulit untuk ditanami tanaman pertanian. Kondisi tersebut cocok untuk pengembangan hutan rakyat. Berdasarkan tipe penggunaan lahan,

maka wilayah Kabupaten Gunungkidul baik di zona pegunungan Batur Agung, Ledok Wonosari maupun Pegunungan Seribu didominasi oleh tipe penggunaan lahan yang berupa hutan rakyat baik dalam bentuk pekarangan, tegalan maupun alas/wono. Hal tersebut yang mendorong petani lebih memilih menanam pohon dibandingkan tanaman pertanian, sehingga perkembangan hutan rakyat dari segi potensi di Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat.

Hutan Rakyat dan Strategi Penghidupan Petani

Hutan rakyat merupakan aset yang digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan karakteristik dan kepemilikan aset berpengaruh terhadap pilihan strategi petani. Strategi penghidupan dibagi menjadi tiga, yaitu (1) intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian; (2) diversifikasi pertanian maupun non pertanian; dan (3) migrasi (Scoones, 1999; Scoones, 2009). Pilihan strategi petani dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain karakteristik internal petani hutan rakyat dan faktor eksternal. Karakteristik internal petani hutan rakyat berupa modal/aset, yang meliputi sumberdaya manusia, fisik, sumberdaya alam, finansial dan sosial. Faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan strategi petani hutan rakyat adalah kondisi pasar dan kebijakan pemerintah (DFID, 1999). Hutan rakyat bagi petani di Gunungkidul merupakan modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaannya mempengaruhi pilihan strategi penghidupan petani. Kebutuhan petani dapat di bedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (Nurhadi, 2000). Kebutuhan jangka pendek meliputi kebutuhan yang dikeluarkan petani untuk kehidupan sehari-hari misalnya untuk pengadaan bahan makanan, pakaian, transportasi dan kebutuhan lain yang dikeluarkan secara harian. Kebutuhan jangka menengah meliputi kebutuhan untuk membayar biaya sekolah anak, pengadaan pakaian

dan biaya kesehatan. Kebutuhan jangka panjang misalnya biaya untuk renovasi rumah, pengadaan atau penambahan aset dan biaya untuk hajatan (pernikahan anak). Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka petani menggunakan strategi diversifikasi jenis penyusun hutan rakyat.

Pemilihan strategi diversifikasi oleh petani Gunungkidul didasarkan pada aset dan pengetahuan lokal yang dimilikinya. Diversifikasi penanaman pohon dilakukan oleh petani untuk menciptakan diversifikasi penghasilan, pengumpulan modal untuk investasi dan untuk kebutuhan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat (Nibbering, 1999). Petani telah memahami sifat-sifat silvikultur pohon, walaupun mungkin tidak mampu menerangkan pengetahuannya kepada orang lain. Petani juga tahu sifat-sifat kayu (aspek teknologi), cara penebangan (aspek eksploitasi) dan cara mengerjakan kayu (aspek pengolahan hasil) menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi (Simon, 2004). Pola penanaman agroforestri di lahan hutan rakyat dianggap mampu menyelesaikan permasalahan petani. Kombinasi tanaman berdaur panjang dan pendek dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani.

Pemilihan jenis pohon dalam pembangunan hutan rakyat hendaknya memenuhi tiga aspek, yaitu (1) sesuai dengan keadaan iklim, jenis tanah, kesuburan dan kondisi fisik wilayah, (2) cepat menghasilkan dan dapat dibudidayakan oleh masyarakat dengan mudah, (3) menghasilkan komoditas yang mudah dipasarkan dan memenuhi bahan baku industry (Simon, 2007; Sabarnurdin, 2008). Petani hutan rakyat Gunungkidul cenderung lebih memilih menanam jati untuk di tanam di lahan hutan rakyat. Petani bersedia menanam jati meskipun hasil yang akan diterimanya dalam jangka panjang karena ekspektasi harga jati yang cukup tinggi (Djamhuri, 2008).

Pengelolaan hutan rakyat dengan diversifikasi penyusun jenis didalamnya dapat digambarkan sebagai suatu model sistem ekologi manusia. Awang (2004) mengenalkan

sistem ini dengan singkatan POET variable. Variable POET yaitu P adalah *population*, O adalah *organization*, E adalah *environment*, dan T adalah *technology*. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat sementara lahan yang tersedia tetap bahkan cenderung turun dikarenakan perubahan peruntukan lahan, misalnya untuk pemukiman, industri dan peruntukan yang lain merupakan hal yang harus diperhatikan. Pemanfaatan lahan harus dilakukan secara intensif baik secara horizontal maupun vertikal.

Kombinasi berbagai jenis penyusun hutan rakyat merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Pohon yang mempunyai daur lebih panjang dapat dikombinasikan dengan tanaman perkebunan maupun pohon MPTS (*multi purposes trees species*) yang hasilnya lebih cepat dapat dimanfaatkan. Selain itu pohon dapat dikombinasikan dengan tanaman pertanian yang bersifat semusim sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek petani. Kunci utama keberhasilan kombinasi jenis ini adalah pilihan jenisnya, sehingga tidak terjadi kompetisi hara dan sinar matahari.

Organisasi sangat diperlukan para petani hutan rakyat karena luas kepemilikan lahan yang sempit seringkali tidak memenuhi skala ekonomi usaha sehingga diperlukan kerjasama diantara para petani. Selain itu dengan berhimpun dalam organisasi maka posisi tawar petani dapat meningkat terutama ketika bernegosiasi dengan pedagang dalam penentuan harga. Hutan rakyat dengan beragamnya jenis penyusun tegakan mempunyai keragaman yang tinggi sehingga secara ekologi mempunyai biodiversitas yang tinggi. Selain itu dengan keberadaan hutan rakyat tersebut akan dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Munculnya sumber mata air baru maupun sumber mata air yang dulunya sudah hilang kini dapat difungsikan kembali. Hutan juga mempunyai kemampuan untuk menyimpan cadangan karbon dalam biomasnya. Kandungan karbon dari lahan

hutan rakyat yang tersimpan di atas tanah di Jawa mencapai 40,7 juta ton (BPKH, 2009).

Penggunaan teknologi pada saat ini adalah sebuah keniscayaan. Kualitas lingkungan yang semakin menurun memerlukan intervensi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Penggunaan bibit unggul, pemilihan spesies yang sesuai dengan syarat tempat tumbuhnya dan teknik budidaya yang intensif merupakan solusi yang dapat dilakukan. Strategi penanaman lahan hutan rakyat dengan beberapa pilihan komoditas yang menghasilkan dalam jangka waktu yang berbeda tersebut merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhannya (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Hal tersebut merupakan kearifan petani selain untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang berbeda sekaligus untuk menyebar risiko apabila terjadi kegagalan panen.

Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Penghidupan

Petani menanam pohon pada lahan hutan rakyat merupakan bagian dari strategi untuk mendiversifikasi produk hasil hutan rakyat baik dari segi jenis maupun waktu panen (Fillius, 1997). Hutan rakyat telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi petani hutan rakyat di Gunungkidul. Besarnya kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani dapat dilihat pada Tabel 2. Pendapatan petani yang berbasis lahan didominasi oleh pendapatan dari hutan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hutan rakyat telah mampu menyokong penghidupan petani di Gunungkidul. Komposisi jenis hutan rakyat yang beragam dengan kombinasi antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian merupakan bagian dari strategi diversifikasi petani. Setiap produk hasil hutan rakyat di panen dalam waktu yang berbeda, sehingga kelestarian ekonomi dan ekologi di hutan rakyat dapat terjaga.

Pendapatan petani yang bersumber dari lahan terdiri dari produk yang berasal dari hutan rakyat, sawah, dan dari hutan negara.

ketiga sumber pendapatan dari lahan, maka hasil dari hutan rakyat menunjukkan kontribusi yang terbesar. Di Desa Katongan yang berada di zona Batur Agung, hutan rakyat telah berkontribusi 33,94% dari total pendapatan petani. Hutan rakyat di Desa Dengok yang berada di Ledok Wonosari berkontribusi 13,31% dan di Desa Jepitu yang berada di zona Pegunungan Seribu hutan rakyat dapat berkontribusi pendapatan petani hingga 40,52% dari total pendapatan. Kontribusi tersebut berasal dari tanaman kehutanan, tanaman pertanian, tanaman perkebunan dan hasil hutan lainnya seperti tanaman obat-obatan, daun maupun

kayu bakar. Tanaman kehutanan di dominasi oleh jati, selanjutnya mahoni, akasia, sono, dan sengon. Tanaman pertanian berupa padi dan palawija (kacang tanah, kedelai, jagung). Tanaman obat-obatan misalnya berupa empon-empon seperti kunyit, temu-temuan, jahe. Petani hutan rakyat di Gunungkidul melakukan diversifikasi produk dengan cara memanfaatkan lahan hutan rakyat dengan teknik agroforestri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sabarnurdin (2008) dan Duguma (2012), yang menyatakan bahwa praktek agroforestri dapat mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penghidupan petani.

Tabel 2.
Pendapatan Petani Berdasarkan Sumbernya

No	Sumber pendapatan	Katongan		Dengok		Jepitu	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A. Lahan							
1	Hutan rakyat	7.203.592	33,94	2.361.472	13,31	14.289.942	40,52
2	Sawah	539.133	2,54	167.283	0,94	0	0
3	Hutan Negara	135.000	0,64	1.456.399	8,21		
	Jumlah A	7.877.725	37,11	3.985.154	2,46	14.289.942	40,52
B. Non Lahan							
1	Ternak	2.950.633	13,90	6.091.033	34,33	8.101.000	22,97
2	Jasa	3.068.500	14,46	5.590.333	31,51	7.154.167	20,29
3	Wirausaha	6.776.667	31,92	905.833	5,11	5.543.333	15,72
	Jumlah B	12.795.800	60,28	12.587.199	70,94	20.798.500	58,97
C. Lain-lain							
1	Kiriman keluarga	483.333	2,28	1.165.000	6,57	170.000	0,48
2	Bantuan	70.183	0,33	5.667	0,03	9.667	0,03
	Jumlah C	553.516	2,61	1.170.667	6,60	179.667	0,51
	Total (A,B,C)	21.227.041	100	17.742.899	100	35.268.109	100

Sumber. Data primer, 2013

Besarnya kontribusi setiap produk hasil hutan rakyat dapat dilihat di Tabel 3. Menanam pohon bersama-sama dengan tanaman pertanian adalah kegiatan yang banyak dilakukan petani Gunungkidul. Berdasarkan Tabel 3 diantara beberapa jenis komoditas hasil hutan rakyat di zona Batur Agung tanaman kehutanan atau hasil hutan kayu berkontribusi paling besar (61,67%)

demikian juga di zona Ledok Wonosari (59,15%). Hasil tanaman kehutanan yang berasal dari hutan rakyat berupa pohon yang dijual oleh petani hutan rakyat kepada pedagang. Penjualan masih dalam kondisi pohon berdiri karena petani tidak mempunyai pengetahuan dan sarana prasarana untuk melakukan penebangan. Jenis pohon yang mendominasi hutan rakyat di Gunungkidul

adalah jati, selanjutnya mahoni, akasia, sono dan sengon. Di zona Pegunungan Seribu kontribusi terbesar dari produk hutan rakyat berasal dari hasil tanaman pertanian (50,07%). Hal ini apabila dilihat dari kondisi lahan hutan rakyat di zona Batur Agung dan Ledok Wonosari tanaman kehutanan semakin mendominasi jika dibandingkan dengan tanaman pertanian, perkebunan dan tanaman di bawah tegakan. Di zona

Pegunungan Seribu model agroforestri tradisional masih banyak dijumpai, yaitu kombinasi antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Selain hal tersebut harga jual kayu juga mempengaruhi besarnya kontribusi ini. Zona Pegunungan Seribu yang mempunyai topografi lebih sulit dari pada kedua zona yang lain mengakibatkan proses penebangan lebih sulit sehingga harga jual pohon dilevel petani lebih rendah.

Tabel 3.
Pendapatan Petani dari Hutan Rakyat

No	Sumber pendapatan	Katongan		Dengok		Jepitu	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tanaman pertanian	2.244.541	31,16	1.050.383	33,90	7.155.442	50,07
2.	Tanaman perkebunan	198.666	2,76	105.500	3,41	524.833	3,67
3.	Tanaman kehutanan	4.442.333	61,67	1.832.500	59,15	6.485.667	45,39
4.	Lain-lain	318.050	4,42	109.750	3,54	124.000	0,87
Jumlah A		7.203.590	100	3.098.133	100	14.289.942	100

Sumber. Data primer, 2013

Bagi petani hutan rakyat pohon merupakan tabungan dan investasi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang relatif besar dan dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan Djamhuri (2008) yang menyimpulkan bahwa penanam pohon digunakan sebagai tabungan keluarga. Orientasi penanaman pohon tersebut berimplikasi pada pola penanaman di lahan hutan rakyat yang didominasi oleh pohon. Fungsi hutan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diidentifikasi, yaitu (1) mendukung konsumsi langsung masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan subsistennya; (2) sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak; (3) menyediakan kemungkinan cara untuk mengatasi kemiskinan (Babulo, 2009).

Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani memang beragam di setiap daerah. Di Afrika Selatan hutan rakyat berkontribusi 20% dari total pendapatan (Scackleton et al, 2007). Sementara itu di Bangladesh dapat berkontribusi hingga 32% dan di Ethiopia 27%. Perbedaan besarnya kontribusi tersebut di pengaruhi

oleh intensitas pengelolaan, kondisi fisik daerah dan waktu pengambilan data. Akan tetapi, secara umum pengelolaan hutan rakyat di beberapa lokasi telah mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan.

SIMPULAN

Pemanfaatan lahan hutan rakyat yang relatif sempit dengan teknik agroforestri merupakan kearifan lokal petani hutan rakyat sebagai bentuk strategi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani memilih jenis pohon yang berkualitas dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pengelolaan hutan rakyat juga lebih intensif dengan membuat multilayer dan input dari luar yang lebih besar. Strategi diversifikasi dipilih dalam pengelolaan hutan rakyat dengan mengkombinasikan beberapa jenis tanaman baik kehutanan (jati, mahoni, akasia, sono, dan sengon), perkebunan (kakao, buah-buahan) maupun pertanian (padi dan palawija) dapat mengatur pola hasil dari hutan rakyat sekaligus menyebar risiko pengelolaan hutan rakyat. Diversifikasi komposisi jenis penyusun hutan rakyat

tersebut digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda-beda yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani sebesar 13% - 40% terhadap total pendapatan. Sedangkan komoditas yang berasal dari hutan rakyat yang memberikan kontribusi terbesar untuk zona Batur Agung dan Lewok Wonosari berasal dari tanaman kehutanan (59 - 61%). Sementara itu untuk zona Pegunungan Seribu kontribusi terbesar berasal dari tanaman pertanian (59%).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ACIAR, Fakultas Kehutanan UGM dan Digby Race yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti "Overcoming constraint to community-based commercial forestry (CBCF) in Indonesia".

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, 2004. *Household characteristics and forest dependency: evidence from common property forest management in Nepal*. Ecological Economics Journal. Vol. 48. P. 245-257.
- Awang, S.A., E.B.Wiyono, S. Sadiyo. 2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Kontruksi Pengetahuan Lokal. Banyumili Art Network bekerja sama dengan Pusat Studi Hutan Rakyat (PKHR). UGM. Yogyakarta.
- Awang, S.A. 2006. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Debut Press. Yogyakarta.
- Awang, S.A., D. Sepsiaji., dan B. Himmah. 2002. Etnoekologi manusia di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta.
- Babulo, B., B. Muys, F. Nega, E. Tollens, J. Deckers, dan E. Mathijs. 2009. *The Economic Contribution of Forest Resource Use To Rural Livelihoods in Tigray Northern Ethiopia*. Forest Policy and Economics Journal Vol. 11 (2009): P. 109-117.
- BPKH. 2009. *Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa Tahun 1998-2008*. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura dan Multistakeholder Forestry Programme. Yogyakarta.
- Chamber, R., M. Leach., and C. Conroy. *Trees as Savings and Security for the Rural Poor*. Gatekeeper Series No. 3. International Institute for Environment and Development. *Sustainable Agriculture and Rural Livelihoods Programme*. Dapat di akses di www.iied.or.id. Diakses tanggal. 15 Oktober 2014.
- DFID (Department for International Development). 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheet*. DFID. London.
- Djambhuri, T.L. 2008. *Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: the effect of incentive structure and social capital*. Agroforestry System Vol. 74: P. 83-96.
- Duguma, L.A. 2012. *Financial Analysis of Agroforestry Land Uses and Its Implications for Smallholder Farmers Livelihood Improvement in Ethiopia*. Agroforest System. DOI 10.1007/s10457-012-9537 (Diakses 06 Desember 2012).
- FAO. 2010. *Global Forest Resources Assessment 2010 Main Report*. FAO Forestry Paper 163. FAO. Rome.
- Filius, A.M., 1997. *Factors changing farmers' willingness to grow trees in Gunungkidul (java, Indonesia)*. Netherlands Journal of Agricultural Science. Vol. 45. P. 329-345.
- Nibbering, J.W. 1999. *Tree planting on deforested farmlands, Sewu Hills, Java, Indonesia: Impact of economics and institutional changes*. Agroforestry Systems Vol. 46: P. 65-82.
- Nurhadi. 2000. *Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Hutan Rakyat*. Vo. 2 No. 1. Hal 53-64. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

- Palte, J.G.L. 1989. *Upland farming on Java, Indonesia: A Socio-Economic Study of Upland Agriculture and Subsistence Under Population Pressure*. Faculty of Geographical Science, University of Utrecht, The Netherlands.
- Rohadi, D. 2012. Analysis of farmer's perceptions and strategies in smallholders timber plantation business (case studies of smallholder timber plantations at Gunungkidul district, Special Province of Yogyakarta and Tanah Laut District, Province of South Kalimantan. Graduate School of Bogor Agriculture Institute. Bogor (in Indonesia).
- Sabastian, G,E. 2012. *Enhancing the Sustainability of Smallholder Timber Production Systems in the Gunungkidul Region, Indonesia*. The Australian National University.
- Sabarnurdin, S. 2008. Agroforestry: Strategi Penggunaan Lahan Multifungsi, Fleksibel Terhadap Perubahan Tuntuta Pembangunan Berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UGM. Yogyakarta.
- Scoones, I. 1999. *Sustainable Rural Livelihoods, A Framework for Analysis*. IDS Working Paper 72. University of Sussex Brighton.
- Scoones, I. 2009. *Livelihoods Perspectives and Rural Development*. *Journal of Peasant Studies* Vol. 36. No. 1.
- Simon. H. 2004. Aspek Sosio-teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suryanto, P., S.A. Awang., S.M.Widyastuti., D. B. Permadi., D. Ruslanjari., Budi. 2014. *Traditional Silviculture and Its Opportunity in Privately Owned Forest Manoreh Mountain-Kulon Progo*. Kawistara. Vol 2. No. 1.
- Tesfaye, Y., A. Roos, B., M. Cambell, dan F. Bohlin. 2011. *Livelihood Strategies and the Role of Forest Income in Participatory-Managed Forests of Dodola Area in The Bale Highlands Southern Ethiopia*. *Forest Policy and Economics Journal* Vol. 13 : P. 258-265.
- Utari, A.D. 2012. Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara. Cakrawala. Yogyakarta.